

**RESPON PEDAGANG KLITHIKAN
TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Relokasi Pasar Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi, S. Sos.**

Disusun Oleh:

**NUR FITRIANA KUSUMANINGTYAS
NIM 05720003**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Nur Fitriana Kusumaningtyas
NIM : 05720003
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan munaqasyah.

Yogyakarta, 30 November 2009

Yang menyatakan,



Nur Fitriana Kusumaningtyas
NIM. 05720003

Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari Nur Fitriana Kusumaningtyas

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fitriana Kusumaningtyas
NIM : 05720003
Prodi : Sosiologi
Judul : Respon Pedagang Klithikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Relokasi Pasar Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)

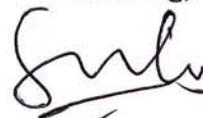
Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sosiologi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2009

Pembimbing,



Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
NIP. 19761224 200604 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/1212.a/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Respon Pedagang Klithikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Relokasi Pasar Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Fitriana Kusumaningtyas
NIM : 05720003
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, tanggal 30 Desember 2009
Dengan nilai : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang,

Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
NIP. 19761224 200604 2 001

Penguji I,

Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19711212 199703 1 002

Penguji II,

Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750312 200604 1 001

Yogyakarta, 30 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
D e k a n,



Dra. Hj. Susilaningsih, M.A.
NIP. 19471127 196608 2 001

MOTTO

Kemauan adalah sangat penting sebab aksi dan kerja biasanya mengikuti kemauan. Dan dengan kemauan kita membuka ke arah sukses.¹

(Louis Pasteur)

There is no challenge more challenging than the challenge to improve ourself.²

(Nur Fitriana K.)

¹ Mahbub Djunaidi, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, (Jakarta Pusat: Dunia Pustaka Jaya, 1982), hlm. 79.

² Tidak ada tantangan yang lebih menantang dari pada tantangan untuk memperbaiki diri kita sendiri.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Almamaterku, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN
Sunan Kalijaga,
semoga ke depannya semakin baik dan maju
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.*

*Kedua orang tuaku (Bapak Puji Winarto dan Ibu Siti
Wasirah),
ananda sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya
atas kasih sayang serta doanya yang tiada henti.
Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan yang
terbaik.*

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Sang Khaliq, Allah SWT yang menguasai seluruh raga, jiwa, pikiran, tindakan, perbuatan, dan ucapan manusia, termasuk diri penulis yang menjadi bagian dari manusia di seluruh jagad alam raya. Untaian kata terpuji, salam, serta proses imitatif selalu dihaturkan kepada Nabi Allah, Muhammad SAW.

Suatu proses dari karya kecil yang berjudul “Respon Pedagang Klithikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Relokasi Pasar Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)” ini penulis ajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan tersusun. Karena itulah, pada kesempatan ini tidak lupa penulis haturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Susilaningih, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, terimakasih juga atas masukan-masukannya.
3. Ibu Sulistyaningsih S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi (Pak Syarif, terimakasih banyak Pak atas masukan-masukannya. Pak Musa, Pak Abie, Bu Sulis, Bu Ambar, Bu Nafsiah, dan Pak Zainal) yang tidak hanya mengajarkan ilmu dan kedisiplinan, namun juga mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat.

5. Staf dan karyawan TU Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, terimakasih banyak atas bantuannya.
6. Bappeda Propinsi DIY, Dinas Perizinan Pemkot Yogyakarta, dan Dinlopas kota Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
7. Para pedagang klithikan Pakuncen dan Pemkot yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berguna bagi penulisan skripsi.
8. Bapak, Ibu, dan adik tercinta, atas kasih sayang dan perhatian yang tak pernah surut serta do'a yang tak pernah putus.
9. David Idris Habibie, S.HI., atas teladan, motivasi dan bantuanmu selama ini.
10. Bapak Muhammad Khozin, S.IP., M.PA; Ujang Fahmi; Nur Indah Kusumawati,S.Sos.; Siti Aminah, S.pd.I; Sulistya Agung P.; Putrinda Nur Inayahanum, S.IP. dan Sosio Bela Putri Perdana atas bantuan dan *supportnya*
11. Teman-teman Sosiologi angkatan 2005, Erwin, Fukho Cahyo, Saprol, Babe Kiting, Toni, Iim, Fuad Ardlin, Irfan, Paruk, Sarip, Deni, Wati, Bang Huda, Rukib, Nandar, Supri, Nita, Risa, Vira, May, Iid, A'id, Mas Ariel, Hendrawan, Roni, Umam, Mita, Titin, Jauhar atas kebersamaan kita selama ini. Teristimewa untuk Wina, Nining dan Susi, terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang indah ini, semoga 'kan tetap terjalin hingga kita renta nanti.

Pada akhirnya, skripsi ini bukanlah semata-mata karya akhir dari penulis, melainkan salah satu capaian untuk dapat memasuki belantara kehidupan lain yang telah menunggu. Semoga ke depannya, penulis dapat berkarya lebih berkualitas lagi untuk kemaslahatan masyarakat. Amiin.

Yogyakarta, 30 November 2009

Nur Fitriana Kusumaningtyas
NIM. 05720003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	11
E.1 Teori Konflik	12
E.2. Teori Tindakan Sosial.....	15
E.3. Teori Fungsionalisme Struktural	19
F. Metode Penelitian	21
F.1. Lokasi Penelitian.....	21
F.3. Penentuan Unit Analisis.....	22
F.4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	24

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	27
A. Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta	27
B. Pasar di Wilayah Kota Yogyakarta	29
C. Pasar Klithikan	37
C.1. Pasar Klithikan Mangkubumi.....	38
C.2. Pasar Klithikan Pakuncen.....	41
BAB III DASAR KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN RELOKASI PEDAGANG KLITHIKAN	48
A. Lahirnya Kebijakan Penataan PKL	48
B. Relokasi Pedagang Klithikan sebagai Implementasi Kebijakan Penataan PKL.....	54
BAB IV RESPON PEDAGANG KLITHIKAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	65
A. Proses Relokasi Pedagang Klithikan	65
B. Peranan Paguyuban dalam Proses Relokasi	71
C. Respon Pedagang Klithikan terhadap Kebijakan Penataan PKL	78
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel I. Daftar Nama Pasar di kota Yogyakarta	31
Tabel II. Daftar modal untuk memulai usaha berdagang klithikan.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.	Pasar Klithikan Pakuncen	41
Gambar II.	Lorong antara Blok B1 dan B2 yang Menjual Onderdil dan Barang Klithikan.....	43
Gambar III.	Los Onderdil Salah Seorang Pedagang.....	46
Gambar IV.	Wawancara dengan Ketua Paguyuban KOMPAK	74

DAFTAR SINGKATAN

BGAD	: Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah
Dinlopas	: Dinas Pengelolaan Pasar
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
KBP	: Kartu Bukti Pedagang
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Kimpraswil	: Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
KOMPAK	: Komunitas Pedagang Klithikan Pakuncen
KPKMPR	: Komunitas Pedagang Klithikan Mangkubumi Pendukung Relokasi
KR	: Kedaulatan Rakyat
LOD	: Lembaga Ombudsman Daerah
PHK	: Pemberhentian Hubungan Kerja
Pemkot	: Pemerintah Kota
Perindagkoptan	: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Pethikbumi	: Paguyuban Pedagang Klithikan Mangkubumi
PP	: Peraturan Pemerintah
PKL	: Pedagang Kaki Lima
Perwal	: Peraturan Walikota
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	: Sumber Daya Manusia

ABSTRAK

Menjadi pedagang klithikan adalah alternatif pekerjaan yang dinilai cukup menjanjikan. Banyaknya permintaan pasar membuat orang semakin tertarik untuk membuka usaha di pasar klithikan. Bertambahnya jumlah PKL klithikan ternyata membawa masalah baru bagi lingkungan. Keberadaan PKL telah diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2002. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007 sebagai juklak PP berhasil merelokasi pasar klithikan dari Jalan Mangkubumi ke pasar klithikan Pakuncen, karena lokasi tersebut dinilai lebih representatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses relokasi yang di dalamnya menuai berbagai respon dari pedagang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan data yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan Sosial (Max Weber) yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain dan tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subjektif.

Hasil analisis menyimpulkan: *pertama*, lahirnya kebijakan penataan PKL disebabkan kurang tertibnya pedagang di wilayah Jl. Mangkubumi. *Kedua*, awalnya beberapa pedagang menilai relokasi sebagai kebijakan yang tidak menguntungkan, karena dampaknya seringkali menjadikan sektor informal termarginalisasikan. Sebagai respon, mereka menggelar aksi demo. Namun, mayoritas pedagang menilai kebijakan relokasi sebagai suatu bentuk keberpihakan pemerintah kepada para pedagang dalam usaha mempertahankan eksistensi pedagang klithikan. Munculnya respon yang kedua ini tidak terlepas dari keberadaan “paguyuban” yang berhasil menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pedagang. *Ketiga*, kondisi pedagang klithikan pasca relokasi dilihat dari pendapatan, belum mengalami kenaikan yang signifikan. Akan tetapi dari sisi yang lain mengalami perubahan yang lebih baik dibanding prarelokasi. Kualitas SDM pedagang meningkat setelah mengikuti berbagai pelatihan, status pedagang menjadi legal, dan secara teknis, perdagangan lebih praktis karena disediakan *bunker* untuk menyimpan barang pada tiap los. Pedagang juga merasa lebih nyaman karena bangunan pasar Pakuncen permanen dan lebih representatif.

Key words: Respon, Pedagang Klithikan, Relokasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, sehingga menjadikan kota ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang diperhitungkan. Selain wisata budaya yang telah lama menjadi *icon* wisata di Kota Gudeg ini, kini kota Yogyakarta memiliki *icon* baru sebagai Kota Wisata Belanja yang menawarkan aneka pasar modern hingga pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional ternyata mempunyai daya tarik tersendiri, salah satunya adalah pasar yang mayoritas memperjual belikan barang-barang bekas, masyarakat mengenal pasar ini dengan istilah Pasar Klithikan.

Nama *klithikan* sendiri mulai dikenal masyarakat kota Yogyakarta sejak tahun 1960-an. Kata *klithikan* ini memang tidak memiliki arti secara baku. Kata *klithikan* tercipta karena barang-barang yang dijual kebanyakan adalah benda-benda kecil yang bila dilempar akan menimbulkan bunyi *klithik*¹ Pendapat lain mengenai pengistilahan pasar ini, kata *klithikan* berasal dari kata *klithih* yang artinya yaitu aktivitas berjalan-jalan santai sembari awas mata memandang barang-barang orang lain yang bisa dibawa pulang (dicuri), sehingga barang yang diperjualbelikan di sana adalah barang bekas milik orang lain.² Pasar Klithikan berlokasi di beberapa tempat, di antaranya di Jl. Mangkubumi, Asem Gede, dan

¹ Yunanto Wiji Utomo, *Pasar Klithikan Yogyakarta, Berburu Barang Bekas dan Unik*, 2006, <http://www.yogyas.com>, diakses tanggal 2 April 2009.

² Donum Theo, *Pasar Klithikan Pakuncen*, 2007, <http://angkring.or.id>, diakses tanggal 2 April 2009.

Alun-alun Selatan. Dari ketiga lokasi pasar tersebut, jalan Mangkubumilah yang pedagangnya paling banyak, karena lokasinya berada di pusat kota dan letaknya cukup strategis.

Keberadaan pasar klithikan yang merupakan salah satu dampak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 itu terbukti mampu membantu menghidupkan sektor perekonomian lokal masyarakat kota Yogyakarta. Beberapa tenaga kerja yang sebelumnya kehilangan pekerjaan akibat kasus PHK dapat membuka di sana. Pasar klithikan juga merupakan bentuk perjuangan sosial ekonomi bagi sebagian kalangan masyarakat perkotaan. Pasar klithikan menjadi salah satu alternatif solusi bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah (*grass root*) yang menghadapi masalah. Di lokasi tersebut, pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah daripada di toko. Mereka juga bisa menjual barang yang masih bisa dimanfaatkan bila membutuhkan uang.

Pedagang klithikan sangat khusus, unik dan memberikan kemudahan bagi konsumen hingga pada akhirnya pedagang klithikan tumbuh kompetitif dan prospektif. Lambat laun pasar klithikan Jl. Mangkubumi ini semakin ramai dikunjungi orang. Keadaan ini mengakibatkan kondisi di Jl. Mangkubumi menjadi kurang tertib. Misalnya, jalur lambat yang digunakan untuk area parkir. Selain itu juga keadaan kota terlihat kurang tertata dan tidak adanya taman kota. Masalah

kota menurut kenyataannya timbul sebagai akibat dari perencanaan dan karena itu secara siklus harus dipecahkan lewat perencanaan pula.³

Pijakan untuk membuat kebijakan terkait penataan ruang di wilayah DIY pada umumnya dan kota Yogyakarta pada khususnya, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah kota Yogyakarta Tahun 2006.⁴ Bab VI Bagian Pertama tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 53 ayat 2 berisi tentang “Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban”. Ayat 3, berisi tentang ”Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan unit kerja yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Bagian kedua tentang insentif dan disinsentif, Pasal 54 ayat 4 menyatakan bahwa “Kebijaksanaan disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah”.

Pemerintah berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 45 Tahun 2007⁵ memutuskan untuk memberikan lokasi baru yang lebih tertata dan tertib bagi para pedagang klithikan dari ketiga lokasi tersebut.⁶ Tata ruang kota yang ideal tengah

³ B.N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 122.

⁴ Pemerintah Kota Yogyakarta, *Rancangan Kebijakan tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2016*, 200, <http://elisa.ugm.ac.id>, diakses tanggal 24 Juni 2009, pukul 09.22 WIB. Peraturan tersebut berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2016

⁵ Berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

⁶ Kompas, *Klitikan Jalan Pangeran Mangkubumi Dipasangi Tanda Larangan*, 2007, <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0711/14/jogja/1044614.htm>, diakses tanggal 2 April 2009.

digalakkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta guna mewujudkan visi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, Pusat Pelayanan Jasa yang Berbasis Lingkungan”⁷.

Pemindahan pedagang klithikan ke pasar klithikan Pakuncen di Jl. HOS Cokroaminoto ini merupakan upaya Pemkot dalam memberikan lokasi berdagang yang lebih representatif serta melokalisasi kiprah pedagang klithikan dalam satu atap sehingga memudahkan upaya pembinaan dan pengawasannya. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan status pedagang dari pedagang informal menjadi pedagang formal, mempunyai status hukum lebih kuat dan aman.

Upaya relokasi tersebut sebenarnya mempunyai tujuan yang memberikan keuntungan bagi para pedagang. Akan tetapi ternyata upaya Pemkot Yogyakarta ini kurang memperhatikan beberapa kekurangan dari lokasi baru pasar klithikan. Di antaranya lokasi pasar yang dianggap kurang strategis dan kurang *marketable* untuk menjaring konsumen, minimnya sarana transportasi kota sehingga sulit dijangkau oleh publik, serta ketiadaan pusat-pusat hiburan dan rekreasi di kawasan tersebut yang mampu menarik antusiasme masyarakat. Untuk meminimalisir hal-hal yang dipermasalahkan terkait letak ini, Pemkot berjanji mempromosikan dengan gencar lokasi baru pasar klithikan ini agar semakin banyak masyarakat yang berkunjung dan berbelanja di sana sehingga pasar klithikan Pakuncen ini juga akan menjadi salah satu tujuan wisata di kota Yogyakarta seperti pasar klithikan sebelum direlokasi.

⁷ Peraturan Daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2007.

Kebijakan relokasi pasar klithikan ini menuai berbagai respon dari masyarakat, khususnya pedagang. Sebelum dilaksanakan proses relokasi pasar Klithikan pada tanggal 11 November 2007, banyak pedagang yang menolak kebijakan Pemkot karena banyak orang yang mendapatkan rezeki dengan berjualan di tempat itu. Mereka khawatir adanya relokasi akan mempengaruhi pendapatan mereka. Pedagang klithikan Mangkubumi juga menggugat Perwal Nomor 45 Tahun 2007 karena mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan Perwal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang hendak digali lebih dalam yakni:

1. Apakah penyebab lahirnya kebijakan relokasi pasar klithikan?
2. Bagaimanakah proses relokasi pasar klithikan?
3. Bagaimanakah respon pedagang klithikan terhadap relokasi atau implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dan respon yang timbul dari para pedagangnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab lahirnya kebijakan relokasi pasar klithikan.

2. Mengetahui proses relokasi pasar klithikan yang merupakan kebijakan penataan PKL.
3. Mengetahui respon dan reaksi yang muncul dari pedagang klithikan terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima.
4. Mengetahui kondisi pedagang klithikan, pra dan pasca implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima.
5. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota Yogyakarta sebagai pihak pembuat kebijaksanaan terkait penataan PKL dalam rangka menata kota Yogyakarta menjadi lebih “Berhati Nyaman”.
6. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai titik tolak penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

D. Telaah Pustaka

Kondisi suatu kota yang ideal tentu menjadi impian semua masyarakat manapun. Mewujudkan kota yang ideal di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi program kerja Pemkot atau pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Akan tetapi, seperti yang sering kita dengar di berbagai media, tidak sedikit program tersebut diwarnai banyak protes dan perlawanan yang sangat tragis. Tentu hal ini telah memotivasi banyak kalangan untuk melakukan penelitian ilmiah, mengenai bagaimana kebijakan yang diterapkan di wilayahnya masing-masing. Hasil penelitian itu dapat memperkaya khasanah intelektual masyarakat kita.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penyusun berusaha melakukan analisis terhadap beragamnya respon yang timbul akibat adanya kebijakan pemerintah mengenai penertiban dan penataan PKL di kota Yogyakarta. Untuk menunjukkan orisinalitas kajian yang penyusun angkat, penyusun melakukan tinjauan beberapa studi yang relevan.

1. **Islahul Amal** (*Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Tata Kota dan Lingkungan*)⁸. Studi ini menyatakan bahwa masalah sosial perkotaan yang terwujud konflik-konflik yang menyangkut ruang merupakan suatu kekerasan primer di kota-kota Indonesia. Masalah sosial ini dilihat sebagai interaksi antara pola distribusi ruang dan proses sosial, serta distribusi kekuasaan. Studi Islahul Amal yang dilakukan di Semarang ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang tata ruang kota yang menuai konflik akibat pembelokan alur sungai Tawang dan Ronggolawe.

Adanya perubahan-perubahan kondisi politik, kondisi teknis dan kondisi psiko-sosial pada warga Tawang Mas, mereka telah menciptakan kesadaran kolektif. Kesadaran ini memunculkan keberanian untuk mengadakan konflik terbuka dan menggalang kekuatan untuk mencapai kepentingan manifes.

2. **Bariatul Himmah** (*Perencanaan Kota dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Pinggiran Kota*)⁹. Studi ini menyatakan bahwa perencanaan kota

⁸ Islahul Amal, *Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Tata Kota dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi, Fisipol UGM, 2001).

⁹ Bariatul Himmah, *Perencanaan Kota dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Pinggiran Kota*, (Yogyakarta: Sosiologi, Fisipol UGM, 1999).

itu di dalamnya termuat Perencanaan Tata Ruang Kota, Perencanaan Ekonomi, serta Perencanaan Sosial memiliki implikasi khusus terhadap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Perencanaan kota merupakan salah satu akar terjadinya fenomena (proses) *landreform* (konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, industri, dll.).

Perencanaan kota sebagai suatu konsepsi dari suatu pembangunan yang “akan” dilakukan memiliki kekuatan-kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan industrialisasi merupakan bagian dari perencanaan ekonomi, namun memiliki keterkaitan dan implikasi yang kuat pada aspek perencanaan yang lain. Konteks perencanaan tata ruang memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan ekonomi. Perencanaan kota juga memiliki korelasi aktif pada perubahan sosial dalam masyarakat. Dan di dalam skripsi ini lebih menyorot korelasinya dengan *social engineering*, melalui implementasi kebijakan industrialisasi di desa ini.

Studi yang dilakukan oleh Bariatul Himmah ini menyoroti tentang perubahan sosial yang timbul akibat implementasi kebijakan industrialisasi pada wilayah pinggiran kota Beji.

3. Indah Surya Wardhani (*Kota sebagai Ruang Interaksi Ekonomi Politik*)¹⁰.

Studi ini menyatakan bahwa Malioboro adalah salah satu kontruk kebijakan tata ruang kota yang menyediakan ruang integrasi bagi beragam individu dan kelompok dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan kultur. Dalam ruang

¹⁰ Indah Surya Wardhani, *Kota sebagai Ruang Interaksi Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2003).

integrasi itu terjalin relasi antarkelompok yang berafiliasi pada beragam kelompok sosial-etnis dan kekerabatan-juga pada kelompok politik.

Relasi kelompok PKL Malioboro juga tidak terlepas dari problematika interaksi ekonomi politik. Otoritas dan kewenangan juga berbeda dalam relasi segitiga antara PKL-Pemkot-Pemilik Toko membuat potensi konflik yang rentan terhadap konflik kepentingan. Sedikit berbeda dengan relasi yang lain, relasi antara PKL dan Pemkot adalah relasi struktural vertikal, antara pihak yang menjadi sasaran penataan kawasan dengan pihak pemegang otorita penataan kawasan. Posisi ini dipertegas dengan dikeluarkannya perangkat hukum untuk mengatur PKL dengan peraturan terbaru Perda PKL 26/2002 yang dianggap memberikan pengakuan cukup besar bagi PKL Malioboro.

Dalam relasi antara PKL dan Pemkot, terlihat bahwa Pemkot yang bertindak sebagai pemegang otorita penataan PKL kerap kali berbenturan kepentingan dengan organisasi PKL. Hal ini dapat ditengarai dengan munculnya beragam respon terhadap Perda ini.

Studi oleh Indah Surya Wardhani di Malioboro ini mengambil objek dari tiga kalangan, yakni PKL, Pemkot, dan Pemilik Toko. Sehingga relasi yang terjadi dari interaksi ketiga kalangan ini akan beragam.

4. **Edy Andriyanto** (*Perkembangan Kota, Alih Fungsi Lahan dan Respon Masyarakat Petani*)¹¹. Studi ini menekankan studinya tentang pengaruh kebijakan pembangunan pemukiman di lahan pertanian terhadap masyarakat petani. Dalam penelitiannya yang dilakukan di desa Sidoarum, kecamatan

¹¹ Edy Andriyanto, *Perkembangan Kota, Alih Fungsi Lahan dan Respon Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Fisipol, UGM, 2002).

Godean, Sleman, ditarik kesimpulan bahwa aktivitas pembangunan fisik kota bergerak sangat cepat, namun kepesatan pembangunan tersebut pada umumnya tidak disertai oleh daya dukung (*carrying capacity*) lahan yang memadai, sehingga terjadi pemanfaatan lahan yang tidak semestinya. Lahan pertanian di pinggir kota yang potensial untuk pertanian terpaksa digunakan untuk membangun kompleks perumahan, industri, maupun infrastruktur kota lainnya.

Implementasi pembangunan perumahan ini telah berdampak pada perubahan penggunaan lahan yang diikuti oleh degradasi lingkungan dan perubahan sosial, ekonomi, budaya masyarakat, antara lain menyangkut mata pencaharian, konsepsi dan praktek hidup bersama, serta aspek sosio kultur lainnya. Hal ini tentunya memunculkan berbagai respon dari masyarakat terhadap kondisi riil yang ada, bahkan dimungkinkan munculnya bentuk-bentuk protes atas tekanan yang mereka hadapi. Protes warga ini semakin dipicu oleh adanya campur tangan pemerintah dalam pengadaan lahan, dengan intervensi yang dimilikinya memberikan hak-hak atas tanah pada pengembang untuk melakukan intervensi.

Implementasi kebijakan pembangunan permukiman di Sidoarum, dalam kaitannya dengan konteks perencanaan tata ruang kota mengindikasikan penekanan pada paradigma perencanaan yang bersifat *top down* dan menunjuk pada pendekatan analitis yang masih mendominasi perencanaan ini, sehingga perencanaan sekedar sebagai kepanjangan dari *advanced capitalisme*. Proses kapitalisme pedesaan melalui proyek

pembangunan perumahan memberi kontribusi pada konversi lahan pertanian. Sehingga mengakibatkan terjadinya penyempitan kesempatan kerja petani di sektor pertanian bahkan di antara mereka kehilangan pekerjaan utamanya.

Studi yang dilakukan oleh Edy Andriyanto ini mengupas masalah yang muncul akibat konversi lahan pertanian menjadi kompleks perumahan, industri, maupun infrastruktur kota lainnya. Akibatnya timbul kekhawatiran, para petani akan kehilangan mata pencahariannya.

Sedangkan studi yang telah penyusun lakukan di pasar klithikan Yogyakarta ini juga terkait dengan kebijakan penataan PKL yang merupakan salah satu usaha penataan kota. Kebijakan relokasi pasar klithikan ini memunculkan berbagai respon, khususnya dari para pedagang. Dalam merespon kebijakan ini, pedagang terpecah dalam dua kelompok, yakni kelompok yang mendukung dan menolak relokasi. Akan tetapi, pada akhirnya, setelah satu tahun proses relokasi terlaksana, pedagang yang tadinya menolak relokasi, bersedia menempati pasar klithikan Pakuncen. Adanya perbedaan respon inilah yang menjadi salah satu bahan kajian penyusun, selain itu juga ingin mengetahui penyebab dan proses relokasi pasar klithikan, serta mengetahui perbandingan kondisi pedagang antara sebelum dan setelah direlokasi.

E. Kerangka Teori

Secara sosiologis, kota mempunyai kultur dan karakter yang berbeda dengan desa. Karakteristik suatu kota menurut Sorokin dan Zimmermen didasarkan atas mata pencaharian, kepadatan penduduk, lingkungan, ukuran

komunitas, heterogenitas, differensiasi, mobilitas dan sistem interaksi.¹² Selanjutnya teori yang penyusun gunakan untuk melandasi penelitian tentang respon pedagang klithikan terhadap implementasi kebijakan penataan PKL sebagai salah satu kebijakan penataan kota ini adalah:

E.1. Teori Konflik

Menurut teori konflik (Ralf Dahrendorf), masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Seperti pada proses relokasi pasar klithikan ini, setiap elemen, yakni pemerintah kota dan pedagang memberikan sumbangan dalam terciptanya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial itu terjadi baik antara pemerintah dan pedagang, maupun antar pedagang yang berbeda pendapat atau kepentingan. Keteraturan yang terdapat dalam pedagang itu muncul karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (ketidakbebasan yang dipaksakan).¹³ Pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan hukum untuk merealisasikan kebijakan-kebijakannya tersebut.

Dalam setiap hubungan atau organisasi tertentu pasti akan ada suatu pembedaan dikotomi yang jelas antara mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang tunduk pada penggunaan otoritas tersebut. Pembedaan ini didasarkan terutama bukan pada karakteristik pribadi, melainkan pada posisi yang sudah

¹² Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta:Gama Pres,1999), hlm. 15.

¹³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 26.

melembaga dan sah dalam “asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif”. Peran yang dimainkan individu, apakah dominasi atau kepatuhan, dikaitkan dengan posisi yang mereka tempati.

Dengan demikian, posisi-posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.¹⁴ Seperti kasus pada pasar klithikan ini, ketika pembuat kebijakan, yakni Pemkot menerbitkan kebijakannya, sementara masyarakat ada yang tidak menerima, akibatnya timbul konflik. Konflik yang terwujud secara latent dan manifest ini terjadi antara pedagang dan Pemkot serta antar pedagang. Konflik antar pedagang lebih berwujud latent, misalnya dengan saling menyindir atau terjadi hubungan yang kurang harmonis lagi karena adanya perbedaan respon di antara mereka. Sedangkan konflik antara pedagang dengan pemerintah sudah berwujud konflik menifes, contohnya demo yang dilakukan pedagang di balai kota.

Meskipun beberapa kali telah dilakukan arbitrase untuk menentukan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, pada akhirnya tetap kebijakan pemerintah terlaksana (kebijakan yang bersifat *top down*). Dahrendorf, juga mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus (kontak/integrasi) dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan mempunyai

¹⁴ George Ritzer&Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta:Kencana, 2003),hlm. 154-155.

konflik kecuali ada konsensus. Sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsesus.

Konflik memiliki beberapa fungsi. Menurut Berghe, fungsi konflik yakni¹⁵:

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas (*in-group*). Setelah terjadi konflik masing-masing pedagang klithikan memiliki kepentingan yang sama (*senasib seperjuangan*), dari kepentingan yang sama antar pedagang maka tumbuh solidaritas yang lebih kuat diantara mereka, dari solodaritas yang semakin kuat ini maka lahirlah kelompok yang kemudian diberi nama paguyuban.
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Ketika kelompok pedagang klithikan merasa terdesak saat terjadi konflik dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang tentunya memiliki *power* yang lebih kuat, maka pedagang klithikan mersa butuh bantuan sehingga mereka menciptakan aliansi dengan kelompok lain, dalam hal ini adalah LSM dan para pengunjung pasar dan masyarakat kota Yogyakarta yang mendukung kepentingannya.
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, konflik relokasi bermula dari perseteruan kepentingan antara pemerintah dengan pedagang klithikan sehingga pihak-pihak yang awalnya pasif yaitu pihak yang merasa kepentingannya terusik, dan pihak yang terbawa oleh benturan kepentingan tersebut mereka akan menjadi aktif dengan mengambil langkah dan sikap.
4. Fungsi komunikasi. Besar kecilnya konflik akan mempengaruhi sedikit banyaknya intensitas komunikasi antar individu atau kelompok, selama terjadi

¹⁵ *Ibid.* hal. 29.

konflik relokasi, telah tercipta komunikasi baik antar pedagang klithikan maupun dengan pemerintah.

E.2. Teori Tindakan Sosial

Dalam meneliti suatu permasalahan diperlukan adanya suatu pendekatan tertentu agar penelitian tersebut lebih mudah serta lebih terarah pelaksanaannya. Dalam Sosiologi, pendekatan tersebut bisa dinamakan dengan paradigma. Paradigma digunakan dalam menanggapi atau menjawab gejala atau fenomena yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah Paradigma Definisi Sosial. Exemplar paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Max Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (*social action*). Menurut Weber bahwa struktur sosial dan pranata sosial membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri, menurut Weber berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial. Perkembangan dari suatu hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan-tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu dimana ketika ia mengambil manfaat dari tindakannya memberikan perbedaan makna pada tindakan itu sendiri dalam perjalanan waktu. Tindakan manusia tanpa kecuali sepanjang yang dimaksudkan

sebagai tindakan yang menyatakan keterlibatan manusia secara individual pantas dikategorikan sebagai tindakan sosial.¹⁶

Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan nyata-nyata diarahkan kepada orang lain juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari suatu situasi tertentu. Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain di mana tindakan tersebut merupakan perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Maksudnya, pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi dan sejauh mana tindakan individu untuk memikirkan dan memperhitungkan tindakan itu kepada orang lain.

Semakin rasional tindakan sosial itu, maka semakin mudah dipahami. Atas dasar rasionalitas, Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe¹⁷:

1. Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*)

Yakni tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya, tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Aktor dilihat memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling

¹⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 214-217.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 220-222.

bersaingan ini. Aktor itu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Hal ini mungkin mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan itu.

2. Rasionalitas yang Berorientasi Nilai (*Wertrationalitat*)

Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Aktor itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu, atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya. Apabila kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau

didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan.

4. Tindakan Afektif

Tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.

Tindakan para pedagang yang menerima relokasi dengan membentuk kelompok adalah tindakan sosial. Begitu juga dengan tindakan pedagang yang menolak relokasi dengan menggelar aksi unjuk rasa juga merupakan tindakan sosial. Lebih spesifik lagi, tindakan tindakan sosial yang dilakukan oleh para pedagang baik yang mendukung ataupun yang menolak relokasi termasuk dalam tindakan rasional instrumental. Maksudnya adalah tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan atau antara efisiensi dengan efektifitas.

Menurut tindakan rasional instrumental, pedagang tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya, tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Pedagang itu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Pada kasus pedagang yang

menolak relokasi, mereka memilih cara yang mereka nilai baik untuk mempertahankan kepentingan mereka. Mereka menilai, mencari dukungan masyarakat dengan mengumpulkan tanda tangan adalah salah satu alat yang efektif untuk mencapai tujuan mereka.

E.3. Teori Fungsionalisme Struktural

Dalam fungsionalisme struktural, istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan, kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa perlu mengetahui fungsinya begitu juga sebaliknya. Fungsionalisme kemasyarakatan (Societal Functionalism), sebagai salah satu pendekatan fungsionalisme struktural, paling dominan digunakan para fungsionalis struktural. Perhatian utama dari fungsionalisme kemasyarakatan ini ialah struktur sosial dan institusi masyarakat secara luas, hubungannya dan pengaruhnya terhadap anggota masyarakat (individu/pemain).

Dalam masyarakat pasti ada stratifikasi atau kelas. Stratifikasi sosial merupakan fenomena yang penting dan bersifat universal. Stratifikasi adalah keharusan fungsional, dan dipandang sebagai sebuah struktur, dan tidak mengacu pada stratifikasi individu pada sistem stratifikasi, melainkan pada sistem posisi (kedudukan). Kedudukan pemerintah dalam relokasi ini adalah sebagai pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memang fungsional bagi keberlangsungan kondisi ketertiban dan keteraturan masyarakat kota Yogyakarta.

Pusat perhatian teori ini ialah bagaimana agar posisi tertentu memiliki tingkat prestise berbeda dan bagaimana agar individu mau mengisi posisi tersebut.

Masalah fungsionalnya ialah bagaimana cara masyarakat memotivasi dan menempatkan setiap individu pada posisi yang tepat. Secara stratifikasi masalahnya ialah bagaimana meyakinkan individu yang tepat pada posisi tertentu dan membuat individu tersebut memiliki kualifikasi untuk memegang posisi tersebut.

Menurut teori yang dibawa oleh Talcot Parsons ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.¹⁸ Hal ini terlihat dari peran paguyuban sebagai sarana arbitrase atas konflik yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah maupun antar pedagang.

Penempatan sosial dalam masyarakat menjadi masalah karena tiga alasan mendasar, *pertama*, posisi tertentu lebih menyenangkan daripada posisi yang lain. *Kedua*, posisi tertentu lebih penting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat daripada posisi yang lain. *Ketiga* setiap posisi memiliki kualifikasi dan bakat yang berbeda. Posisi yang tinggi tingkatannya dalam stratifikasi cenderung untuk tidak diminati tetapi penting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat, juga memerlukan bakat dan kemampuan terbaik. Pada keadaan ini masyarakat

¹⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Op. Cit. hlm. 21-22.

dianjurkan agar memberi *reward* kepada individu yang menempati posisi tersebut agar dia menjalankan fungsinya secara optimal. Jika ini tidak dilakukan maka masyarakat akan kekurangan individu untuk mengisi posisi tersebut yang berakibat pada tercerai-berainya masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan respon pedagang klithikan terhadap implementasi kebijakan penataan PKL. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bisa menggambarkan dan memberikan suatu penjelasan tentang masalah tersebut.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipergunakan dengan pertimbangan untuk memudahkan ketika dalam penelitian berhadapan dengan suatu kenyataan baru atau kenyataan ganda di lapangan. Kemudian dengan metode kualitatif, hubungan antara peneliti dengan informan lebih akrab dan lebih dekat, sehingga dapat diperoleh data langsung yang lebih mendalam. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti, maka dalam pengumpulan dan pengolahan data ditentukan:

F.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini disusun dilaksanakan di pasar klithikan Pakuncen, Balai Kota, serta Dinas Pengelolaan Pasar. Penyusun memilih lokasi penelitian di sini karena pasar klithikan ini adalah fasilitas yang telah disediakan Pemkot bagi para pedagang klithikan dari jalan Mangkubumi.

F.2. Penentuan Unit Analisis

a. Unit Analisis

Berdasarkan permasalahan yang penyusun angkat dalam penelitian ini, maka unit analisis yang penyusun tentukan adalah seluruh pedagang di Pasar Klithikan Pakuncen yang berasal dari jalan Mangkubumi.

b. Informan

Penelitian ini mengambil topik tentang respon pedagang klithikan terhadap kebijakan penataan PKL. Informan penelitian ini terdiri dari, dinas pengelolaan pasar, Pemkot Yogyakarta, pengurus paguyuban dan pedagang klithikan yang dianggap cukup mewakili untuk menggambarkan keadaan pedagang klithikan secara umum maupun mendetail. Menurut Moleong, jika sudah mulai terjadinya pengulangan informasi, maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.¹⁹ Sehingga ketika penyusun memperoleh jawaban yang sama dari beberapa informan, pertanyaan yang sama tidak disampaikan pada informan yang lain. Kriteria informan adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai objek kajian dalam penelitian ini, yaitu tentang respon para pedagang klithikan terhadap implementasi Perwal No.45 tahun 2007 tentang penataan PKL.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Penelitian Metode Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 225.

F.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1. Observasi/ Pengamatan, merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁰ Pengamatan tentang fenomena yang terjadi di pasar klithikan yang menyangkut dengan diberlakukannya kebijakan penataan PKL ini dilakukan secara intens dalam waktu beberapa hari.

2. Wawancara.

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada para pedagang di pasar klithikan. Untuk memperkaya informasi, juga dilakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait di antaranya lurah dan dinas pengelolaan pasar serta pemerintah kota. Wawancara bertujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi. Wawancara dengan para informan dilakukan secara tidak terstruktur atau wawancara mendalam (*in depth interview*).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui hasil kepustakaan dan dokumentasi.

Data ini diklasifikasi dan dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

²⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2007), hlm. 60.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai media massa, buku-buku, situs internet, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian bersangkutan. Dengan adanya dokumen ini dapat digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan²¹.

F.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar dapat lebih berarti dan dapat diinterpretasikan, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Dalam sebuah penelitian kualitatif, proses analisa dan interpretasi data merupakan upaya yang berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus.²² Proses analisis dalam meneliti respon pedagang tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga sudah mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung baik ketika mengamati interaksi para pedagang maupun ketika mewawancarai pedagang.

Melalui teknik analisis kualitatif tersebut dapat diketahui sebab akibat dari faktor yang menyebabkan munculnya beragam respon dari para pedagang tersebut. Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung:Rasda Karya,2005), hlm. 217.

²² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta:UI-Press, 1992), hlm. 20.

berikutnya adalah mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.²³ Dalam penelitian ini terdapat banyak data yang telah diperoleh. Akan tetapi tidak semuanya relevan dengan judul yang disusun angkat, sehingga data tersebut tidak perlu digunakan.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data tersebut dapat berwujud kalimat faktual sederhana dan paragraf penuh yang ditemukan dalam catatan pengamatan, catatan wawancara atau dokumen lain. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif.²⁴ Data tersebut kemudian dikategorisasikan dengan memilih kode-kode tertentu. Kategori merupakan satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu.²⁵ Data yang tersaji dalam skripsi ini berupa susunan kalimat, baik berupa data hasil wawancara langsung maupun data yang telah diolah oleh penyusun.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁶ Pada deskriptif analitis, rancangan organisasional dikembangkan dari kategorisasi-kategorisasi yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang

²³ *Op. Cit.*, Matthew B. Miles, hlm.16.

²⁴ *Ibid.*, hlm 17.

²⁵ *Op. Cit.*, Lexy J. Moleong, hlm. 19

²⁶ *Op. Cit.*, Matthew B. Miles, hlm. 18-19.

muncul dari data. Dengan demikian, deskripsi baru dapat dicapai. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan *validitasnya*. Tujuan tahap ini adalah untuk mencapai teori substantif melalui proses analitik. Lebih jauh, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan logika yang rasional serta mengandalkan teori atau dalil yang berlaku umum. Misalnya untuk hubungan sebab akibat munculnya suatu respon dari pedagang, kebenaran datanya disesuaikan dengan logika serta teori yang penyusun gunakan untuk menganalisisnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kebijakan relokasi pasar klithikan lahir karena semakin banyaknya jumlah PKL di pasar kithikan Jl. Mangkubumi. Bertambahnya pedagang dan pembeli di lokasi tersebut setiap malamnya mengganggu ketertiban dan kenyamanan para pengguna fasilitas publik yang lain. Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2002 yang mengatur tentang penataan PKL di kota Yogyakarta mengeluarkan Perwal No. 45 Tahun 2007 sebagai Petunjuk Pelaksanaan PP tentang Penataan PKL tersebut. Perwal itulah yang menjadi dasar kebijakan relokasi pasar klithikan dari Jl. Mangkubumi.

Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, wajar jika menimbulkan pro dan kontra. Termasuk kebijakan relokasi pasar klithikan ini, juga menimbulkan pro kontra. Pedagang yang menerima kebijakan (pro) melakukan tindakan dengan membentuk kelompok pendukung kebijakan dan bersatu dengan paguyuban. Sedangkan pedagang yang menolak kebijakan (kontra) melakukan tindakan atau aksi-aksi demonstrasi dan mencari dukungan dari masyarakat.

Kelompok pedagang yang mendukung kebijakan menilai kebijakan relokasi itu nantinya akan memberikan dampak positif bagi mereka. Formalisasi pedagang klithikan dalam satu area terpadu ini memberikan kenyamanan berdagang serta menjamin kepastian berusaha. Selain itu, melalui relokasi ini,

pemerintah melokalisasi kiprah pedagang klithikan dalam satu atap sehingga memudahkan upaya pembinaan dan pengawasannya. Lokalisasi pedagang klithikan ini bukan hanya sekedar ingin memindahkan pedagang maupun menciptakan kawasan ekonomi baru, melainkan juga akan bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan keberhasilan para pedagang. Bahkan, yang lebih monumental lagi, Pemkot Yogyakarta pun telah mengobsesikan bahwa pasar klithikan terpadu ini akan menjadi ikon pariwisata baru yang sangat layak disuguhkan bagi turis-turis mancanegara.

Sementara para pedagang yang menolak relokasi beralasan mereka sudah kerasan di Jln. Mangkubumi dan tidak mau mengambil risiko kehilangan pelanggan. Menurut mereka konsep relokasi ini tidak jelas. Mereka melihat pasar Pakuncen sepi sehingga bila pindah tempat belum tentu dapat memperoleh konsumen yang lebih baik seperti di Jl. Mangkubumi. Sepinya pasar Pakuncen menurut mereka karena lokasi yang dianggap kurang strategis dan *marketable* untuk menjaring konsumen, sehingga mengasingkan keberadaan pedagang klithikan dari khalayak dan komunitasnya.

Selain kelompok pedagang pro dan kontra kebijakan, penulis melihat ada sebagian pedagang lagi yang tidak termasuk ke dalam kedua kelompok tersebut (pro maupun kontra). Kelompok itu tidak berada pada pilihan menerima kebijakan ataupun menolak kebijakan. Kelompok oportunistik itu hanya memanfaatkan situasi demi keuntungan diri mereka sendiri, tanpa berpegang pada prinsip ketika terjadi fenomena pro kontra antar pedagang.

Kelompok ini tetap menjalin komunikasi yang baik pada pedagang yang pro dan kontra. Pada pedagang pro kebijakan, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut mungajukan keinginan sebagai persyaratan sebelum direlokasi. Pada pedagang yang kontra pun mereka (kelompok oportunis) menggunakan kesempatan untuk ikut melakukan aksi protes kepada pemerintah, sehingga mereka tetap mendapatkan tempat (diakui) oleh pedagang yang kontra relokasi. Apapun keputusannya, selama itu menguntungkan, akan mereka dukung. Misalnya, bila mereka tetap boleh berdagang di Jl. Mangkubumi, kelompok oportunis tersebut tidak akan rugi karena tidak kehilangan pelanggan. Dan ketika hasil akhirnya seperti sekarang ini (direlokasi), mereka juga tetap diuntungkan dengan segala fasilitas dan program-program pemberdayaan yang mereka peroleh.

Adanya paguyuban banyak membantu proses negoisasi dan arbitrase sebagai salah satu resolusi antara pihak pemerintah dan pedagang. Selanjutnya paguyuban tersebut menjadi media komunikasi antara pihak pemerintah dan pedagang, selama relokasi ini berjalan hingga sekarang. Melalui pendekatan sosial, pihak paguyuban menyampaikan maksud pemerintah. Dan melalui paguyuban pula para pedagang menyampaikan aspirasi dan keinginan sebagai persyaratan diberlakukannya kebijakan relokasi tersebut.

Sampai penelitian ini disusun, proses relokasi sudah berjalan dua tahun, kondisi pedagang setelah relokasi secara umum lebih baik dari segi pendapatan, lokasi berdagang dan legalitas usaha. Selain itu dukungan dan peran serta pemerintah juga lebih intens dalam mendukung pedagang dengan berbagai program pemberdayaan dan promosi serta bantuan kredit usaha.

B. Rekomendasi

Relokasi PKL adalah salah satu upaya pemerintah guna menciptakan tata ruang kota yang lebih kondusif dan nyaman, relokasi semacam ini akan terus terjadi di berbagai kota, mengingat banyaknya pedagang yang berjualan tanpa adanya izin legalitas dari pemerintah. Selama penyusun melakukan penelitian ini banyak kontribusi yang dihasilkan sehingga pada kesempatan ini penyusun akan memberikan beberapa saran terhadap pemerintah dan pedagang dalam proses relokasi, di antaranya saran tersebut adalah:

1. Kesungguhan Pemkot dalam mewujudkan tata ruang kota Yogyakarta yang lebih kondusif harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan matang sehingga proses yang berjalan tidak menimbulkan keresahan dan kerugian di masyarakat.
2. Tindakan tegas dan tidak adanya pilih kasih dalam merelokasi sangat dibutuhkan sehingga timbul efek jera dan segera tercipta ketertiban di masyarakat. Harapan bagi pemerintah, dalam menindak para pelanggar jangan melihat *back ground* para pelaku tindak pelanggaran tersebut.
3. Penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan perlakuan berdasarkan keinginan PKL dengan menempatkan mereka sebagai subjek atas perubahan. Ini berarti, setiap kebijakan yang akan diberlakukan pada PKL, seharusnya melibatkan PKL dalam penyusunannya, sehingga hal-hal yang diinginkan para PKL bisa

tercover dalam kebijakan tersebut, sejauh tidak merugikan golongan lain.

4. Adanya forum atau paguyuban sangat membantu komunikasi antara pemerintah selaku subyek dan pedagang selaku obyek dalam proses relokasi. Melalui paguyuban, wacana-wacana yang digulirkan pemerintah bisa dipahami secara maksimal oleh pedagang, dan bisa memperkecil munculnya salah paham antara pemerintah dan pedagang. Sehingga dibutuhkan orang-orang terpercaya dan mampu menjadi mediator dalam pengurus paguyuban.
5. Bagi masyarakat yang akan memulai usaha agar memperhatikan aspek legalitas. Jangan sampai mendirikan usaha di tempat-tempat yang dilarang. Terkadang Pemerintah kurang tegas dalam menindak kasus-kasus semacam ini, sehingga setelah sekian lama mendirikan usaha di tempat yang ternyata dilarang, mereka baru mengetahui larangan tersebut.

Selain itu terciptanya keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat juga sangat membantu program-program yang akan dicanangkan pemerintah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Wahab, Sholichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Abdul Qodir, Mas'ud Khasan. *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*. Gresik: Bintang Pelajar.
- Dardak, Hermanto. *Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan sebagai Upaya Mewujudkan Ruang yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Tanjung Mas Inti Semarang. 1992.
- Hariyono, Paulus. *Sosiologi Kota untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Jamil, M. Mukhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: WMC. 2007.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*. Jakarta: Gramedia. 1988.
- Marbun, B.N. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*. Jakarta: Erlangga. 1994.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press. , 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rasda Karya. 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Rasda Karya. 2005.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Mustafa, Ali Achsan. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*. Malang: INTRANS Publishing. 2008.
- Nawawi, Hadari & Mami Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gama Pres. 1996.

- Nugroho D., Riant. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007.
- Nurmadi, Achmad. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa. 1999.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gama Pres. 1999.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Salim, Peter. *Advance English-Indonesia Dictionary, Edisi ke-2*. Jakarta: Modern English Press. 1989
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Soetomo. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Sudarman, Ari. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE. 1992.
- Sukanto. *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif & Psikologis*. Jakarta: Integrita Press. 1985.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Svalastoga, Kaare. *Diferensiasi Sosial*. Jakarta: Bina Aksara. 1989.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Twikromo, Argo. *Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Bayang-bayang Budaya Dominan*. Yogyakarta: Media Pressindo. 1999.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah:

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 tahun 1991 tentang Rencana detail tata ruang kota kotamadya daerah tingkat II Yogyakarta 1990-2010.

Peraturan Daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2007

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33

Internet:

Antara News. *Presiden: Pengusaha Muda Ddiharapkan Jadi Pilar Lima Paradigma Pembangunan*. 2007. <http://www.antara.co.id/>. diakses tanggal 24 Juni 2009 pukul 12.57.

BKPM, *Peta Daerah Istimewa Yogyakarta*. 2006. <http://regionalinvestment.com>, diakses tanggal 13 Oktober 2009.

KOMPAS. *Klitikan Jalan Pangeran Mangkubumi Dipasangi Tanda Larangan*. 2007. <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0711/14/jogja/1044614.htm>. diakses tanggal tgl 2 april 2009.

Kompas, *Relokasi Klitikan Pethikbumi Daftarkan Pencabutan Perwal ke PTUN* , 2007, <http://www2.kompas.com>, diakses tanggal 2 April 2009.

Nurlita Sari, Dara. *Muncul di Kala Krisis, Klithikan Merangkak Menuju Pasar Alternatif*. 2006. www.trulyjogja.com. Diakses tanggal 27 Maret 2008. pukul 13.00 WIB.

Pemerintah Kota Yogyakarta. *Rancangan Kebijakan tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2016*. 2006. <http://elisa.ugm.ac.id>, diakses tanggal 24 Juni 2009, pukul 09.22 WIB.

Prinawati, Wiwit. *Menteri Koperasi dan Ukm Resmikan Pasar Klithikan*. 2007. <http://jogja.go.id>. Diakses tanggal 15 Desember 2008 pukul 10.25.

Susanto, Ronny. *Sejarah Kota Jogja*. 2009. <http://students.ukdw.ac.id>. Diakses tanggal 15 Desember 2008. 10:09.

Theo, Donum, *Pasar Klithikan Pakuncen*. 2007. <http://angkringan.or.id>. diakses tanggal 2 April 2009.

Waluyo Jati, Ancas. *Menyoal Kawasan Ekonomi Klithikan*. 2006. www.kompas.com. Diakses tanggal 27 Maret 2008. pukul 13.15 WIB.

Warsono, *Kemudahan Akses Menarik Pendatang ke Yogya*, 2009, <http://www.koran-jakarta.com>, diakses tanggal 12 Desember 2009.

Wiji Utomo, Yunanto. *Pasar Klithikan Yogyakarta, Berburu Barang Bekas dan Unik*. 2006. <http://www.yogyes.com>. diakses tanggal 2 April 2009.

Referensi Skripsi:

Amal, Islahul. *Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Tata Kota dan Lingkungan*. Skripsi S1 Jurusan Sosiologi Fisipol UGM Yogyakarta. 2004.

Andriyanto, Edy. *Perkembangan Kota, Alih Fungsi Lahan dan Respon Masyarakat Petani*. Skripsi S1 Jurusan Sosiologi Fisipol UGM Yogyakarta. 2002.

Himmah, Bariatul. *Perencanaan Kota dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Pinggiran Kota*. Skripsi S1. Jurusan Sosiologi. Fisipol UGM. Yogyakarta .1999.

Wardhani, Indah Surya. *Kota sebagai Ruang Interaksi Ekonomi Politik*. Skripsi S1 Fisipol UGM. Yogyakarta. 2003.

Sumber Lainnya:

Dinas Pengelolaan Pasar kota Yogyakarta. *Buku Pedoman Pelayanan Pasar*. Yogyakarta: Pemerintah kota Yogyakarta. 2009.

Data Monografi kelurahan Pakuncen, kelurahan Wirobrajan, kota Yogyakarta tahun 2008 semester II.

Dinas Pengelolaan Pasar kota Yogyakarta. *Profil Pasar Tadisionol kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah kota Yogyakarta. 2007.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Fitriana Kusumaningtyas
TTL : Bantul, 3 Mei 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Imogiri km 5,5 Bangunharjo Sewon Bantul
E-mail : acha_qche@yahoo.co.id
No. Hp : 0857 4333 0990

Nama Orang Tua:

- a. Ayah : Puji Winarto
- b. Ibu : Siti Wasirah

Riwayat pendidikan:

1. SD Muhammadiyah Karangajen I Yogyakarta (Tahun 1993-1999)
2. SLTP N 2 Sewon (Tahun 1999-2002)
3. SMA N 1 Sewon (Tahun 2002-2005)
4. Strata I Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2005-2009)

INTERVIEW GUIDE

A. Pedagang klithikan

1. Sejak kapan Anda berjualan klithikan?
2. Dari mana Anda mengetahui rencana relokasi ini?
3. Bagaimanakah respon Anda mendengar rencana tersebut?
4. Apakah bapak/ibu sekarang punya pekerjaan sampingan? Jika ya, sebut dan jelaskan!
5. Berapa pemasukan bapak dalam satu bulan? Jika mendapatkan penghasilan dari selain menjadi pedagang klithikan, sebutkan!
6. Apakah bapak/ibu merasakan perbedaan ketika berjualan ditempat lama (Jl. Mangkubumi) dengan di sini? Jelaskan!
7. Bila dibandingkan dengan tempat semula, Anda lebih senang berada di mana? Mengapa?
8. (Bila di Pakuncen lebih sepi) Usaha-usaha apa saja yang Anda lakukan untuk mempromosikan barang dagangan Anda?
9. Bagaimana suasana di lokasi Anda berjualan yang dulu dengan sekarang?
10. Apakah Anda menjadi anggota paguyuban baik di lokasi lama maupun baru?
11. Apa saja manfaat yang anda peroleh dengan bergabung di paguyuban tersebut?
12. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap para pedagang terkait permodalan, pemberdayaan dan promosi?

B. Pemerintah kota

1. Mengapa pasar klithikan direlokasi ke Pasar Kuncen?
2. Mengapa relokasi pasar klithikan baru terlaksana tahun 2007?
3. Berapa lamakah rencana kebijakan ini disusun, sampai pada akhirnya terlaksana?
4. Bagaimanakah proses yang dilakukan pemerintah (dari perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan) dalam merelokasi pasar klithikan?
5. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam perencanaan hingga proses merelokasi pasar klithikan?
6. Hal-hal apa saja yang memudahkan pemerintah dalam menyusun rencana hingga melaksanakan kebijakan relokasi ini?
7. Apa saja tujuan adanya relokasi pasar klithikan?

C. Lurah Pasar dan Dinas Pengelolaan Pasar

1. Aturan-aturan apa saja yang wajib dipatuhi oleh para pedagang?
2. Fasilitas dan pelayanan apa saja yang disediakan oleh dinas pengelolaan pasar?
3. Apa saja kiat-kiat yang dilakukan oleh dinas pengelola pasar untuk menjaga hubungan harmonis antar pedagang dan antara pedagang dengan pengelola pasar?

4. Program apa saja yang disusun untuk memajukan/mengembangkan pasar klithikan?

D. Pengurus Paguyuban

1. Bagaimanakah peran paguyuban di dalam proses relokasi pasar klithikan?
2. Apa saja kegiatan yang diselenggarakan di dalam paguyuban tersebut?
3. Apa saja peraturan yang ditetapkan di dalam paguyuban tersebut?